

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada zaman modern sekarang, tidak asing lagi terhadap permasalahan tentang keuangan bagi sebuah perusahaan. Terdapat beberapa masalah yang harus dihadapi dalam sebuah perusahaan, salah satunya adalah keuntungan atau profit perusahaan. Pada umumnya tujuan dalam mendirikan sebuah perusahaan adalah untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin. Untuk mendapatkan laba tersebut, perusahaan harus mengelolanya secara efisien dan efektif.

Salah satu perusahaan yang memiliki hubungan dengan keuangan merupakan departemen perusahaan dalam bidang perbankan. Bank bertugas mengamankan giro, tabungan dan deposito berjangka dari masyarakat lokal, yang kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat lokal dengan cara pemberian kredit dan menerbitkan bank note.

Dalam segi jenis dan fungsinya itu dibagi menjadi dua jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dimana kedua jenis bank tersebut menjalankan kegiatan usahanya dalam prinsip syariah atau secara konvensional. Fungsi dalam bank umum adalah menyediakan sebuah layanan dalam lalu lintas pembayaran, sementara dalam BPR tidak diizinkan untuk menyediakan sebuah layanan untuk lalu lintas pembayaran.

Salah satu dari kegiatan BPR yang paling penting atau paling utama adalah menyalurkan kredit kepada masyarakat. Kredit yang disalurkan tersebut dapat berupa seperti kredit perorangan, kredit kelompok ataupun kredit perusahaan. Dalam menjalankan suatu kegiatan usaha dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat agar mendapat pendapatan bank dari kredit yaitu dalam bentuk bunga. Bunga adalah sumber paling penting untuk pendapatan bank. Jika diamati dalam laporan *balance sheet* bahkan terlihat bahwa bagian sisi aset bank akan lebih mendominasi oleh jumlah kredit yang diberikan. Demikian juga, jika dilihat dalam laporan laba rugi bank, juga terlihat bahwa pendapatan terbanyak didominasi oleh pendapatan bunga dan provisi kredit.

POJK nomor 4/POJK.03/2015 yang mengatur tentang tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, indenpedensi dan kewajaran. BPR harus memberikan pertanggung jawaban dalam dana yang telah didapatkan dari masyarakat dengan mengelola dana tersebut dengan baik dan benar yang dituangkan dengan laporan keuangan yang akan dipublikasikan dalam setiap triwulan.

Dalam kegiatan penyaluran kredit kepada masyarakat, para pihak bank dan masyarakat membutuhkan sebuah informasi. Setelah informasi yang telah didapatkan itu, sehingga dapat membentuk sebuah persetujuan antara kedua belah pihak yang telah tertuang dalam dokumen surat pengikatan atau perjanjian kredit. Karena kredit adalah sumber pendapatan terbesar dalam perbankan, maka dalam penyaluran kredit bank harus memperhatikan penilaian kesehatan bank. Dalam hal ini, masyarakat yang telah mendapatkan kredit atau yang biasanya disebut dengan

debitur lebih dikontrol oleh bank untuk menjamin pengembalian kredit atau pembayaran kredit secara tepat pada waktunya, sehingga dapat meminimalkan munculnya kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL).

NPL (*Non Performing Loan*) adalah tidak mengembalikan atau membayar kredit secara tepat waktu dalam pengikatan atau perjanjian kredit. NPL (*Non Performing Loan*) selalu terjadi dalam aktivitas kredit diperbankan, oleh karena itu setiap bank mencoba menekan jumlah minimum kredit bermasalah yang akan terjadi sehingga tidak melebihi ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas di perbankan.

**Tabel 1.1**

Laporan NPL, LDR dan ROA

INDIKATOR	2015	2016			2017		
		Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. I	Tw. II	Tw. III
<b>BPR</b>							
Rasio NPL gross (%)	3.04%	3.86%	3.68%	3.62%	5.37%	6.37%	7.18%
LDR	98.93%	98.30%	94.90%	93.57%	91.31%	91.23%	94.86%

**Sumber** : OJK

Pada tahun 2017 Tw III OJK telah merilis rasio kredit bermasalah atau NPL di industri BPR yang telah mencapai 7,18%. Angka ini meningkat dibandingkan NPL pada 2016 Tw III dan 2017 Tw III yang hanya mencapai 3,62% dan 7,18%. Sedangkan, di Kepulauan Riau naiknya NPL menjadi 2,70% pada triwulan kedua 2017 sebelumnya tingkat NPL masih stabil pada angka 1,91%. Penyebabnya NPL meningkat dikarenakan kelesuan ekonomi khususnya di Kota Batam. Berdasarkan

hasil data survei, 78% - 80% porsi NPL di Kepulauan Riau itu ada di Kota Batam. Sedangkan ibukota provinsi, Kota Tanjungpinang menyumbangkan 14% NPL.

Kondisi ekonomi yang lesu juga menyebabkan LDR (*Loan to Deposit Ratio*) atau kemampuan bank untuk menyediakan dana bagi debiturnya menurun. Berdasarkan data yang telah dirilis oleh OJK Kepri, pada tahun 2017 LDR menurun dari 91,31% pada triwulan pertama menjadi 93,57% pada triwulan kedua. LDR (*Loan to Deposit Ratio*) merupakan alat ukur yang menunjukkan dana pihak ketiga yaitu tabungan, giro, deposito berjangka, kewajiban segera dan lain lain, yang digunakan untuk memenuhi permintaan kredit nasabah. Alat ukur ini berguna untuk menaksirkan tingkat likuid bank. Penting bagi pihak manajemen untuk memperhatikan persentase rasio LDR tetap berada pada batas aman yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 15/7/PBI/2013 standar LDR yaitu 78% - 92%. Jika angka rasio LDR berada dibawah 78% maka dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak dapat menyalurkan kembali dengan baik seluruh dana yang telah dihimpun. Sedangkan rasio yang tinggi membuktikan bahwa bank memberikan kredit lebih banyak daripada dana pihak ketiga sehingga secara realistis tidak likuid.

Peran utama dalam perhitungan LDR adalah demi mengetahui dan menilai sejauh mana bank memiliki keadaan yang sehat dalam menjalankan operasi atau kegiatan bisnisnya. Sehingga LDR digunakan sebagai penanda untuk menentukan kesehatan bank. Tingkat kesehatan dan kondisi bank perlu dipertimbangkan untuk kepentingan stakeholder bank, pemilik, pengelola (tim manajemen), orang yang menggunakan layanan perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lain lain.

Tingkat kesehatan keuangan bank dapat diartikan sebagai kesangupan bank untuk melakukan operasi perbankan secara normal, dan dana dapat memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan peraturan perbankan yang telah diatur. Apabila kondisi keuangan bank tidak baik maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank akan menurun dengan seiring waktunya berjalan. Penilaian kesehatan BPR merupakan indikator penting untuk meningkatkan kinerja bank.

Peraturan dalam melindungi kesehatan suatu BPR telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (BI) No.30/12/KEP/DIR tentang “tata cara penilaian kesehatan suatu BPR”. Penilaian tersebut dilakukan dengan parameter penilaian faktor *Capital*, *Asset Quality*, *Management*, *Earning*, dan *Liquidity* (CAMEL). Kelima aspek ini harus dikelola secara seimbang dan semaksimal mungkin dalam membentuk suatu BPR yang sehat. Apabila diantara salah satu aspek mengalami gangguan atau tidak dikelola dengan baik, maka dapat mempengaruhi BPR berdampak buruk terhadap kesehatan dan mempengaruhi aspek-aspek lain yang berdampak negatif terhadap ekonomi. Tabel faktor-faktor kesehatan yang dinilai dan bobotnya digambarkan pada Tabel 1.2.

**Tabel 1.2**

Faktor Kesehatan Bank yang Dinilai dan Bobotnya

Faktor yang dinilai	Bobot
1. Capital (Permodalan)	30%
2. Asset (Kualitas Aktiva Produktif)	30%
3. Management (Kualitas Manajemen)	20%
4. Earning (Profitabilitas)	10%
5. Liquidity (Likuiditas)	10%

**Sumber** : Surat Edaran Bank Indonesia (1997)

Dengan mengetahui cara mengevaluasi tingkat kesehatan BPR, kita dapat mengatur strategi untuk menghasilkan profit atau laba. Melalui laporan keuangan suatu bank, dapat diketahui kinerja bank yang bersangkutan baik ataukah buruk. Rasio-rasio finansial digunakan untuk mengetahui kinerja bank. Rasio diklasifikasikan ke dalam 4 jenis, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas.

Salah satu cara untuk mengevaluasi kualitas kesehatan BPR adalah melihat kesanggupan BPR dalam mendapatkan profit. Penilaian ini didasarkan kepada *rentabilitas* atau *earning* suatu BPR, yaitu dengan kemampuan BPR dalam menghasilkan laba. Alat ukur untuk mengevaluasi laba yang terdiri dari ROA dan BOPO menurut Herli (2013: 138).

Pertumbuhan aset BPR melambat sebesar 11,44% sedangkan triwulan sebelumnya 13,29%. ROA (*Return On Asset*) adalah alat ukur untuk mengukur kesanggupan manajemen bank untuk memperoleh manfaat keseluruhan dari total aset. Alasan untuk memilih ROA merupakan BPR belum *go public* sehingga pertumbuhan aset menjadi lebih utama, tidak seperti bank konvensional yang fokusnya tidak hanya pada pertumbuhan aset perbankan tetapi juga pada distribusi deviden dan NPL dan LDR mempengaruhi naik turunnya presentase ROA. ROA mengukur efektivitas perusahaan yang menghasilkan laba dengan menggunakan aset yang diperlukan untuk mendanai bisnis perusahaan. Profitabilitas (ROA) dapat terpengaruh akibat pemrosesan kredit yang buruk menurut Septiani & Lestari (2016: 294).

Berdasarkan uraian yang diatas,sehingga peneliti merasa tertarik dengan memilih judul “**Pengaruh *Non Performing Loan Dan Loan To Deposit Ratio Terhadap Return On Asset Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kota Batam***”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Adapun permasalahan penelitian dari penelitian ini adalah :

1. Kurangnya pengawasan dalam menangani kredit bermasalah atau NPL mengakibatkan ROA mengalami penurunan pada BPR di Kota Batam.
2. Kurangnya diperhatikan dalam penggunaan analisis CAMEL sebagai indikator kesehatan keuangan bank.
3. Kurangnya pengawasan dalam penyaluran dana pihak ketiga atau LDR.

## **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan masalah yang disebutkan dalam identifikasi masalah di atas, maka akan dibahas dalam penelitian ini batasi pada permasalahan terhadap Pengaruh *Non Performing loan dan Loan to Deposit Ratio* terhadap *Return On Asset* pada BPR di Kota Batam pada tahun 2012 – 2017.

## **1.4 Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah *Non-Performing Loan* (NPL) berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) BPR di Kota Batam?

2. Apakah *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) BPR di Kota Batam?
3. Apakah *Non-Performing Loan* (NPL) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh simultan terhadap *Return On Asset* (ROA) BPR di Kota Batam?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun beberapa tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bahwa *Non Performing Loan* (NPL), yang memiliki dampak signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) BPR di Kota Batam.
2. Untuk mengetahui bahwa *Loan to Deposit Ratio* (LDR) memiliki dampak signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) BPR di Kota Batam.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

#### **1.6.1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu perbankan dan membantu kita lebih memahami tentang pengaruhnya NPL dan LDR terhadap ROA pada BPR di Kota Batam.

#### **1.6.2. Manfaat Praktis**

Dalam prakteknya, hasil penelitian ini berguna untuk menilai pekerjaan bagi pemimpin BPR dalam hal pengaruh NPL dan LDR pada peningkatan ROA dari BPR di Kota Batam.

Manfaat lain yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Manajemen

Penelitian ini mengasumsikan bahwa ini akan membantu manajemen untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan tentang bisnis bank.

2. Bagi Pemerintah.

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan informasi tentang kinerja keuangan Bank dan mengambil langkah-langkah dan panduan untuk mengatasi munculnya masalah keuangan atau (*financial distress*) kebangkrutan bank.

3. Bagi Akademis

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat membagikan informasi dan pengetahuan kepada para peneliti untuk melakukan penelitian serupa sebagai referensi untuk peningkatan penelitian di masa depan.

4. Bagi Investor

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan informasi kepada investor dan pertimbangan ketika membuat keputusan investasi.